

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan cita-cita seluruh bangsa, termasuk Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Pemerintah melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Dimana hal ini berarti maksud dari pembangunan nasional itu sendiri adalah guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum agar tercipta kehidupan yang adil dan makmur (Arrista Trimaya 2014).

Kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial dapat juga diartikan sebagai suatu kondisi sejahtera, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya perbaikan terhadap penyakit sosial tertentu saja (Saputra 2020).

Untuk mencapai kesejahteraan sosial, pemerintah membuat berbagai kebijakan dalam upaya pembangunan. Pembangunan yaitu sebuah proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan dasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional seperti halnya dengan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Todaro 2014).

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial adalah dengan melakukan pembangunan manusia. Pembangunan manusia

merupakan sebuah proses yang mana dalam hal ini dimaksudkan agar penduduk dapat memperoleh perluasan pilihan melalui berbagai upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar individu atau manusia dengan tujuan agar bisa sepenuhnya berpartisipasi disegala bidang pembangunan. Oleh karena itu pembangunan manusia menjadi penting karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Manusia dalam hal ini tidak hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan saja namun juga diharapkan menjadi subyek dari pembangunan itu sendiri, yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi sebuah daerah yang kemudian secara luas dapat memajukan sebuah negara (Fanny Fibrian 2018).

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah atau negara *The United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah atau negara. Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolak ukur untuk melihat kesejahteraan masyarakat di suatu negara atau daerah dilihat dari 3 dimensi, yaitu angka harapan hidup untuk mengukur tingkat kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah untuk mengukur tingkat pendidikan, serta kemampuan daya beli untuk mengukur standar hidup layak. Ketiga indikator tersebut saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain, selain itu Indeks Pembangunan Manusia juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat apabila ketiga indikator ditingkatkan, Indeks

Pembangunan Manusia yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu negara atau daerah (Nawarti Bustaman 2021).

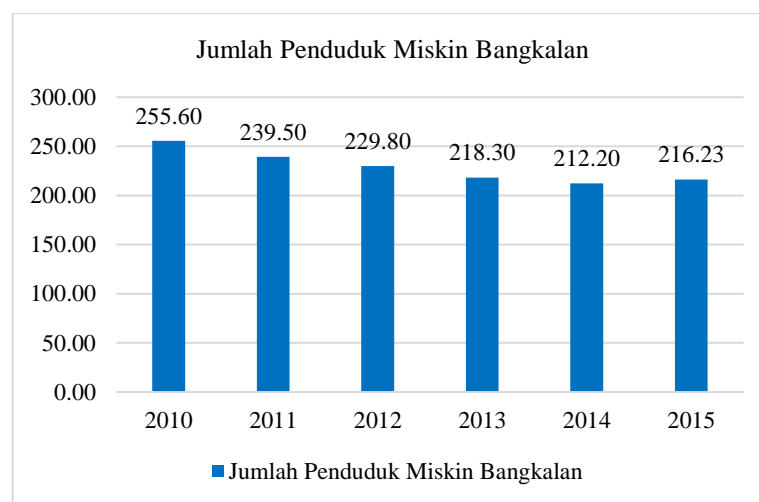
Permasalahan yang umum terjadi di Indonesia adalah pembangunan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah yang semestinya, hal ini dikarenakan karakteristik dan permasalahan di setiap daerah berbeda. Akibatnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut menurun karena pembangunan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan begitu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus mencakup seluruh bidang, apabila pembangunan dilakukan hanya dibidang tertentu saja maka tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada atau bahkan akan menimbulkan masalah baru (Ndakularak E., Nyoman Djinar Setiawina 2014).

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian dari kawasan percepatan pertumbuhan ekonomi. Posisi strategis Kabupaten Bangkalan tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Dimana kawasan ini disebut dengan Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila yang merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Kesejahteraan identik dengan kemiskinan, karena seseorang atau individu dikelompokkan miskin atau tidak berdasarkan seberapa jauh telah terpenuhinya indikator-indikator kesejahteraan. Pada tahun 2021 Kabupaten Bangkalan

menempati posisi ke 6 terbesar dari 38 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur berdasarkan jumlah penduduk miskin dengan jumlah sebesar 215,97 ribu jiwa. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki jumlah penduduk miskin yang besar jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur.

**Grafik 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangkalan**  
**Tahun 2010-2015**



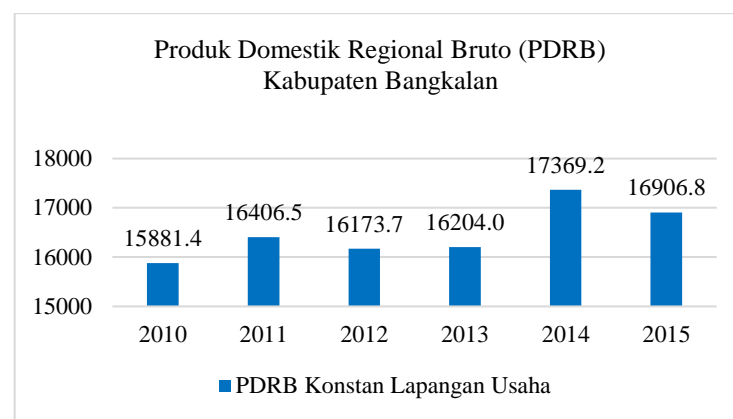
Sumber : BPS Jawa Timur, 2023 (data diolah)

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, di dapat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2010 sebesar 255,6 ribu jiwa yang kemudian terus menurun hingga di tahun 2014 menjadi 212,2 ribu jiwa. Penurunan ini tidak bertahan lama karena di tahun 2015 terjadi kenaikan pada jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan sebesar 216,25 ribu jiwa.

Untuk melihat pemerataan pembangunan dalam suatu daerah dapat tercermin melalui PDRB, karena dapat yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa pada seluruh sektor perekonomian. Apabila terjadi peningkatan PDRB maka otomatis pendapatan perkapita masyarakat akan ikut naik. Melalui kenaikan ini tentu akan meningkatkan konsumsi masyarakat yang nantinya

akan berpengaruh terhadap tingginya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Mankiw 2018). Sehingga PDRB dapat mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat melalui meningkatnya daya beli yang merupakan salah satu dimensi pembentuk IPM. PDRB di Kabupaten Bangkalan pada 2010-2015 :

**Grafik 1.2**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan**  
**Tahun 2010-2015**



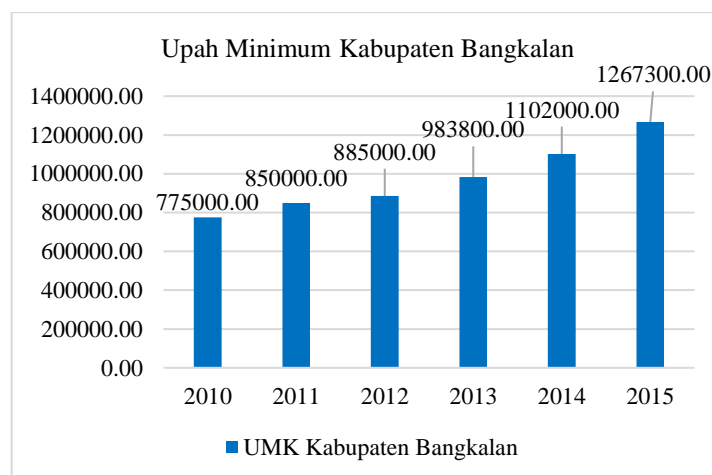
Sumber : BPS Jawa Timur, 2023 (data diolah)

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, PDRB Kabupaten Bangkalan atas dasar harga konstan mengalami fluktuasi dari tahun 2010-2015. PDRB Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan di tahun 2011 sebesar 16.406,5 milyar rupiah dari yang sebelumnya pada tahun 2010 sebesar 15.881,4 milyar rupiah. Namun pada tahun 2012 terjadi penurunan hingga menjadi sebesar 16.173,7 milyar rupiah. PDRB Kabupaten Bangkalan mencapai angka tertinggi selama 2010-2015 terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 17.369,2 milyar rupiah, namun ini tidak dapat bertahan lama karena mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi sebesar 16.906,8 milyar rupiah. Turunnya PDRB Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 disebabkan karena penurunan PDRB di sektor pertambangan dan penggalian, yang mana sektor tersebut merupakan penyumbang utama PDRB Kabupaten

Bangkalan. Meskipun PDRB Kabupaten Bangkalan mengalami fluktuasi di setiap tahunnya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan disetiap tahunnya.

Upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan PDRB saja namun juga dapat dilakukan dengan meningkatkan Upah Minimum Kabupaten. UMK merupakan upah minimum yang berlaku di sebuah daerah. Upah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat karena dengan upah yang tinggi maka seseorang dapat membiayai pengeluaran untuk kebutuhan dasar secara maksimal, dan juga sebaliknya. Sehingga upah sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Shavira, Balafif, dan Imamah 2021). Yang terjadi di Kabupaten Bangkalan adalah UMK Kabupaten Bangkalan terjadi kenaikan disetiap tahunnya dan berdampak baik untuk Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :

**Grafik 1.3**  
**Upah Minimum Kabupaten Bangkalan**  
**Tahun 2010-2015**

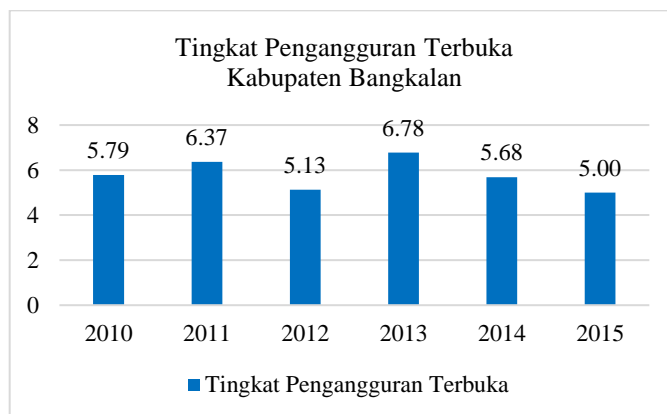


Sumber : BPS Jawa Timur, 2023 (data diolah)

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa UMK di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2010-2015 selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. UMK di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2010 sebesar Rp 775.000 dan kemudian terus meningkat hingga Rp 1.267.300 di tahun 2015. Dalam hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi upah yang didapat maka akan berdampak baik bagi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di suatu daerah yang mana dalam hal ini terbukti dengan adanya kenaikan UMK dapat menurunkan jumlah penduduk miskin (BPS Kabupaten Bangkalan 2022).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, permasalahan yang perlu ditangani adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan sebuah kondisi seseorang tidak bekerja sehingga membuat seseorang tidak mampu memiliki pendapatan tinggi. Adanya bonus demografi apabila tidak imbangi dengan perluasan lapangan kerja maka akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran, sehingga dapat menurunkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Berikut persentase dari Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bangkalan:

**Grafik 1.4**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangkalan**  
**Tahun 2010-2015**



Sumber : BPS Jawa Timur, 2023 (data diolah)

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bangkalan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun 2010-2015. Pada tahun 2011 menunjukkan capaian yang negatif pada level 6,37% atau naik 0,58% dibandingkan tahun 2010. Keberhasilan pemerintah Kabupaten Bangkalan menekan angka pengangguran pada tahun 2012 hingga mencapai 5,13% dari 6,37% pada tahun 2011 tidak diiringi pada tahun berikutnya. Sehingga mengakibatkan terjadinya kenaikan hingga mencapai angka tertinggi sebesar 6,78% pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan sebesar 5,68% dan 5,00%. Meskipun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangkalan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun namun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan terus mengalami penurunan di setiap tahunnya.

Kesejahteraan menjadi amat penting dan juga cita-cita bagi seluruh bangsa. Semua individu ingin dan berhak untuk memiliki hidup yang sejahtera, begitupun juga pada masyarakat Kabupaten Bangkalan. Namun yang terjadi adalah kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan rendah yang ditandai dengan memiliki peringkat kedua terbawah atau urutan ke 37 dari 38 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia. Kabupaten Bangkalan masuk dalam Bangkorwil IV Pamekasan yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep yang mana diantara daerah-daerah tersebut Kabupaten Bangkalan termasuk dalam kawasan yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar ke tiga. Selain itu perkembangan PDRB dan TPT di Kabupaten Bangkalan mengalami fluktuasi disetiap tahunnya, meskipun demikian nilai IPM di Kabupaten Bangkalan tetap naik. UMK di



Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan disetiap tahunnya sejalan dengan kenaikan IPM. Sehingga hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan. Berdasarkan penjelasan indikator-indikator yang telah dijelaskan dan jika melihat kondisi Kabupaten Bangkalan yang berada pada satuan wilayah Gerbangkertosusila yang merupakan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Jawa Timur namun memiliki IPM terendah serta memiliki jumlah penduduk miskin terbesar diantara daerah yang berada dalam kawasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangkalan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangkalan ?
2. Apakah Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangkalan ?
3. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangkalan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan di penelitian yang akan mendatang dan sebagai sumbangan tentang konsep ilmu ekonomi.
2. Pemangku kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan memberikan informasi yang berguna untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.
3. Mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang ilmu kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai referensi bagi yang melakukan penelitian di masa mendatang dengan tema kesejahteraan masyarakat.